



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 05 Desember 2024

Halaman: 11

TAJUK RENCANA

Tren Turunnya Partisipasi Pemilih

KITA tersentak dengan fenomena turunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024, khususnya di Kota Yogya. Sekadar gambaran, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Yogya sebelumnya, tahun 2016 mencapai hampir 80 persen, namun Pilkada 2024 ini turun menjadi 65 persen, penurunan yang sangat signifikan. Tren penurunan tingkat partisipasi pemilih juga menjadi fenomena di tingkat nasional. Mengapa bisa demikian ?

Konkretnya, merujuk hasil rekapitulasi Pilkada Kota Yogyakarta 2024, terdapat 208.401 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sementara daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat sebanyak 320.594 pemilih. Dengan demikian, ada 112.193 pemilih yang tidak mendatangi TPS pada 27 November 2024, atau hanya 65 persen (KR 4/12). Tentu ini menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggara Pilkada di Kota Yogyakarta, baik KPU maupun Bawaslu Kota.

Mengapa 112.193 orang tidak mendatangi TPS dan memberikan suaranya ? Apakah mereka berada di luar kota sehingga enggan untuk kembali ke Yogya menggunakan hak pilihnya ? Atau sebab lain, misalnya mereka berada di Kota Yogya, namun sengaja tidak memilih karena memang tidak cocok dengan kandidat yang berkontestasi. Atau mereka memang bersikap apatis terhadap hajatan pesta demokrasi di Yogya, sehingga acuh tak acuh ?

Pertanyaan tersebut harus dijawab penyelenggara Pilkada Kota Yogya untuk kepentingan evaluasi Pilkada berikutnya. Apalagi, KPU Kota Yogya merasa telah melakukan sosialisasi memadai lewat berbagai media, baik media sosial maupun mainstream. Penilaian dari Bawaslu bahwa partisipasi pemilih pada Pilkada lumrah terjadi, kiranya perlu direspons secara kritis. Apalagi banyak pemilih yang

berdomisili di luar daerah, yang kemudian menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih.

Hemat kita, menurunnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Yogya yang hanya 65 persen patut menjadi perhatian serius. Kita menganggapnya bukan lumrah lagi, sehingga harus menjadi perhatian sesama pemangku kepentingan. Logikanya, dengan semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih, membawa konsekuensi legitimasi Pilkada itu sendiri. Semakin tinggi partisipasi pemilih, maka semakin kuat pula legitimasinya. Sebab, pemberian suara dalam Pilkada menjadi indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya.

Untuk memastikan penyebab menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Yogyakarta memang perlu survei sehingga hasilnya akurat. Hasil survei itulah yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan Pilkada berikutnya. Meski begitu, kita meyakini, tingkat literasi masyarakat tentang demokrasi lokal di DIY sudah cukup baik. Sehingga, boleh jadi bukan karena mereka tidak tahu tentang hak-hak politiknya, melainkan justru karena tidak ada kandidat yang, menurut mereka, cocok untuk dipilih.

Bila itu yang terjadi, maka persoalan lebih mengarah pada vigur, yakni vigur yang mampu menyelesaikan persoalan di Kota Yogyakarta, mulai dari persoalan sampah, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran hingga persoalan hak memperoleh pendidikan secara layak. Inilah persoalan krusial yang dihadapi walikota/wakil walikota terpilih di Kota Yogya. Namun ini baru sebatas hipotesis yang tentu saja harus ditindaklanjuti dengan survei yang komprehensif sehingga hasilnya akurat dan representatif. □ - d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005